

PELAKSANAAN TATA KELOLA ADAPTIF DALAM IMPLEMENTASI STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

Rofli Salim Ramadhan Siregar

NPP. 31.0087

Asdaf Kabupaten Deli Serdang ,Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: 31.0087@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Sarwani, M.Ag

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : Poverty is one of the classic problems that until now has been a concern for the government. Poverty conditions in Indonesia where data obtained from BPS shows that the percentage of poor people until March 2023 is 9.36% with a total poor population of 25.90 million people. Deli Serdang Regency with a population of 1,953,986 people in 2022 based on BPS data has a poverty rate of only 3.62% or 85,280 poor people. This condition is the lowest in North Sumatra. The following is a table of the Percentage of Poor People in Regencies/Cities in North Sumatra in 2020-2022. **Purpose:** The purpose of the research was to find out the implementation of adaptive governance in the implementation of poverty alleviation strategies in Deli Serdang Regency. **Method:** The research uses a qualitative approach method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research was based on the Deli Serdang Regency Social Service. The theory used is adaptive Governance sharma (2018). **Result :** The Social Service as a leading sector in poverty alleviation collaborates with the village government, sub-district, and the Service and Agency with the role of local communities in collecting data and monitoring conditions in the poor category. Community empowerment and order not only provide assistance but also improve the competence and quality of human resources in the hope that there can be continuity with community involvement in activities. Decision-making and knowledge as a process of understanding the exchange of knowledge in achieving the goals of the collaborating parties to achieve the goals with the decision remaining in the Regional Head. **Conclusion:** The Social Service as a leading sector in poverty alleviation collaborates with government or non-government institutions by prioritizing community service and services to achieve common goals. The suggestions given are in the form of making a poverty alleviation master plan in Deli Serdang Regency. **Keywords:** Adaptive, Social Service, Deli Serdang, Poverty, and Governance.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan merupakan salah satu masalah klasik yang hingga saat ini menjadi perhatian bagi pemerintah. Kondisi kemiskinan di Indonesia dimana data yang didapatkan dari BPS bahwa persentase penduduk miskin di hingga bulan Maret 2023 yaitu 9,36% dengan jumlah penduduk miskin 25,90 Juta jiwa. Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah penduduk 1.953.986 Jiwa pada tahun 2022 berdasarkan data BPS mempunyai kondisi tingkat kemiskinan hanya diangka 3,62% atau 85.280 Jiwa Penduduk miskin. Kondisi tersebut menjadi yang terendah se-Sumatera Utara. Berikut tabel Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada tahun 2020-2022. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan tata kelola adaptif dalam implementasi strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Deli

Serdang. **Metode:** Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian berfokus pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Teori yang digunakan yaitu *adaptive Governance* sharma (2018). **Hasil/Temuan:** Dinas Sosial sebagai leading sector dalam penanggulangan kemiskinan yang berkolaborasi dengan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, dan Dinas dan Badan dengan peran masyarakat lokal berperan dalam pendataan dan pengawasan kondisi yang berada dalam kategori miskin. Pemberdayaan dan ketertiban masyarakat tidak hanya memberikan bantuan tetapi meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM dengan harapan dapat terjadi kesinambungan dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan. Pembuatan keputusan dan pengetahuan sebagai proses pemahaman pertukaran pengetahuan dalam mencapai tujuan dari pihak berkolaborasi untuk mencapai tujuan dengan keputusan tetap berada di Kepala Daerah. **Kesimpulan:** Dinas Sosial sebagai leading Sector dalam penanggulangan kemiskinan berkolaborasi dengan lembaga pemerintah ataupun non-pemerintah dengan mengutamakan pengabdian dan pelayanan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Saran yang diberikan berupa membuat *masterplan* penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang.

Kata kunci: Adaptif, Dinas Sosial, Deli Serdang, Kemiskinan, dan Tata Kelola.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah klasik yang hingga saat ini menjadi perhatian bagi pemerintah (Faradila & Imaningsih, 2022). Kemiskinan dikaitkan dengan kondisi perbedaan antara si miskin dengan si kaya yang mana terjadi ketimpangan atau kesenjangan di antara mereka (Adhitya et al., 2022). Kemiskinan bukanlah suatu permasalahan yang sederhana dimana merupakan permasalahan yang kompleks dengan kondisi yang ada tidak secara tiba-tiba namun disebabkan oleh berbagai macam permasalahan yang ada (Adhitya et al., 2022).

Kemiskinan mempunyai berbagai macam definisi yang berbeda-beda. Kemiskinan merupakan kondisi yang dialami oleh seseorang yang sulit dalam mencukupi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, dan papan (Zahrawati, 2020). Kemiskinan juga diartikan dengan keadaan kekurangan barang dan uang dalam menjamin kelangsungan hidup (Rah Adi Fahmi et al., 2018). Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana tingkat kehidupan yang ada di bawah minimum standar kehidupan yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan orang hidup sehat (Azizah et al., 2018).

Permasalahan kemiskinan berakar dari berbagai macam sektor seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan, tenaga kerja dan dikatakan sebagai permasalahan multidimensi. Multidimensi diartikan bahwa kemiskinan tidak hanya terkait dengan kebutuhan utama atau primer tetapi menyangkut kebutuhan lainnya. Kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh berbagai macam faktor dimana faktor-faktor tersebut juga dipengaruhi oleh kemiskinan sendiri sehingga kemiskinan menjadi suatu permasalahan yang sulit diatasi dan bersifat multidimensi (Parwa & Yasa, 2019).

Kemiskinan sebagai permasalahan yang mendasar dikarenakan berhubungan dengan keterpenuhan kebutuhan paling dasar kehidupan manusia (Maulana et al., 2022). Kemiskinan juga dipandang sebagai ketidakmampuan berdasarkan ekonomi untuk dapat memenuhi standar kehidupan rata-rata masyarakat pada suatu daerah yang ditandai dengan rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, papan, dan pangan (Purwandari & Ayu, 2021). Selain itu kemiskinan dapat dipandang dari sudut lain berupa ketidakcukupan untuk pendidikan, nutrisi dan kesehatan (Susanto & Pangesti, 2021). Kemiskinan dapat menimbulkan permasalahan politik,

ekonomi dan sosial di masyarakat yang mana dapat mengakibatkan suatu kondisi ketidakstabilan dan kekacauan pada pemerintah (Rizal & Mukaromah, 2020).

Kemiskinan menjadi suatu permasalahan serius dimana hingga saat ini masih belum dapat diatasi sehingga menjadi perhatian dunia (Zahrawati, 2020). Forum nasional ataupun forum internasional menjadikan kemiskinan sebagai salah satu topik yang diperdebatkan meskipun kemiskinan telah muncul jauh ratusan tahun sebelumnya. Namun, kondisi saat ini dimana kemiskinan menjadi suatu pekerjaan rumah besar bagi negara-negara di dunia khususnya negara berkembang (Azizah et al., 2018).

Kemiskinan menjadi permasalahan yang ada di berbagai negara baik negara berkembang ataupun negara maju (Solana, 2021). Indonesia termasuk kedalam negara berkembang yang hingga saat ini masih berusaha menyelesaikan permasalahan kemiskinan (Parwa & Yasa, 2019). Indonesia hingga saat ini masih berupaya untuk dapat memecahkan permasalahan kemiskinan yang terjadi (Kausar Akbar Gani, 2022). Berbagai upaya yang dilakukan salah satunya menjadikan penurunan angka kemiskinan sebagai agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025) (Arifin, 2021).

Kemiskinan bagi pemerintah Indonesia menjadi salah satu permasalahan utama sehingga dimasukkan kedalam program prioritas pemerintah. Pemerintah Indonesia secara tegas mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Peraturan tersebut merupakan upaya keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan menekan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0%.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kondisi di Indonesia meskipun dalam puluhan terakhir perekonomian mengalami pertumbuhan yang baik dan berhasil menjadi negara berpendapatan menengah. Kondisi kemiskinan di Indonesia berdasarkan pengukuran Badan Pusat Statistik menggunakan konsep pemenuhan kebutuhan dasar atau basic needs approach yang mana penduduk miskin diartikan sebagai penduduk yang mempunyai pengeluaran rata-rata perkapita bulanan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan sebuah ukuran dari penambahan garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan non makanan atau GKNM. Untuk mendapatkan garis kemiskinan dilakukan perhitungan yang berbeda untuk wilayah kota dan wilayah desa (Badan Pusat Statistik, 2023)

Berdasarkan garis kemiskinan didapatkan dua kriteria yaitu kemiskinan biasa dan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan biasa yaitu penduduk yang mempunyai pengeluaran rata-rata perkapita bulanan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan biasa menjadi ukuran yang umum digunakan dalam penilaian kemiskinan. Sedangkan untuk kemiskinan ekstrem yaitu kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam makanan, air bersih, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan, sanitasi layak dan akses informasi serta mempunyai pengeluaran berada di bawah Rp.10.739/orang setiap hari atau Rp.322.170/orang setiap bulan (Badan Pusat Statistik, 2023)

Kondisi kemiskinan di Indonesia dimana data yang didapatkan dari BPS bahwa persentase penduduk miskin di hingga bulan Maret 2023 yaitu 9,36% dengan jumlah penduduk miskin 25,90 Juta jiwa. Persebaran penduduk miskin di Indonesia pada perkotaan hingga bulan Maret 2023 yaitu 7,29% atau 11,74 Juta jiwa sedangkan pada penduduk miskin pedesaan yaitu 11,22% atau 14,16 Juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023).

Kondisi kemiskinan di Indonesia tercatat bahwa mempunyai garis kemiskinan di Maret 2023 di angka Rp. 550.458,00/Kapita setiap bulannya yang terbedi atas garis kemiskinan bukan makanan yaitu Rp. 141.936,00 atau 25,79% dan garis kemiskinan makanan Rp. 408,522,- atau 74,21%. Jika dihitung setiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota 4,71 Orang sehingga garis kemiskinan

rumah tangga Indonesia rata-rata Rp. 2.592.657,00/rumah tangga miskin setiap bulannya (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023, p. 2). Kondisi kemiskinan di Indonesia jika dilihat berdasarkan pulau terdapat Pulau Maluku dan Papua yang menjadi daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi yang mencapai 19,68 %

Tabel 1. 1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2023

Tabel 1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau Bulan Maret 2023

No	Pulau	Jumlah Penduduk miskin (Juta jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sumatera	2,20	3,47	5,67	7,97	10,33	9,27
2	Jawa	7,85	5,77	13,62	7,40	11,81	8,79
3	Bali dan Nusa Tenggara	0,65	1,44	2,09	8,50	17,73	13,29
4	Kalimantan	0,38	0,59	0,97	4,45	6,88	5,67
5	Sulawesi	0,50	1,54	2,04	5,87	13,16	10,08
6	Maluku dan Papua	0,16	1,35	1,51	6,13	26,73	19,68
7	Indonesia	11,74	14,16	25,90	7,29	12,22	9,36

Sumber : diolah oleh penulis dari (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023, p. 4)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 Juta jiwa dengan Pulau Jawa sebagai yang terbanyak yaitu 13,62 Juta jiwa tetapi jika dilihat dari persentase penduduk miskin setiap pulau maka Pulau Jawa hanya berada di angka 8,79% atau dibawah persentase penduduk miskin Indonesia yang mencapai 9,36% sedangkan persentase tertinggi yaitu di Pulau Maluku dan Papua yang mencapai 19,68% serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu 13,29%.

Terdapat suatu kondisi yang menarik peneliti di suatu Kabupaten di Sumatera Utara. Pada Kabupaten tersebut di tahun 2022 angka kemiskinan berada di 3,62%. Kabupaten tersebut merupakan Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah penduduk 1.953.986 Jiwa pada tahun 2022 berdasarkan data BPS mempunyai kondisi tingkat kemiskinan hanya diangka 3,62% atau 85.280 Jiwa Penduduk miskin. Kondisi tersebut menjadi yang terendah se-Sumatera Utara.

Sumatera Utara mempunyai persentase kemiskinan pada tahun 2022 yaitu 8,42% dan Kabupaten Deli Serdang menjadi Kabupaten dengan persentase penduduk miskin terkecil se-Sumatera Utara dari tahun 2020-2022. Pada tahun 2022 Kabupaten Deli Serdang hanya memiliki penduduk miskin 3,62% sedangkan untuk Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin selanjutnya yaitu Kabupaten Binjai dengan 5.10%.

Kabupaten Deli Serdang menjadi kabupaten/kota dengan tingkat persentase kemiskinan terendah se-Provinsi Sumatera Utara dengan data sebagai berikut :

Tabel 2

Persentase Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2022

No (1)	Tahun (2)	Persentase (%) (3)	Perubahan (4)	Keterangan (5)
1.	2020	3.88	-	Terendah Se-Provinsi Sumatera Utara
2.	2021	4.01	+0.13%	Terendah Se-Provinsi Sumatera Utara
3.	2022	3.62	-0.39%	Terendah Se-Provinsi Sumatera Utara

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan <https://sumut.bps.go.id/indicator/23/73/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kab-kota.html> diakses pada 28 November 2023 Pukul 13.21

Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 menjadi kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan terendah se-Provinsi Sumatera Utara. Namun, Pada tahun 2021 terjadi kenaikan persentase yaitu 0.13% tetapi kenaikan tersebut menjadi kenaikan terendah ke-empat se-Provinsi Sumatera Utara dan tetap menjadikan Kabupaten Deli Serdang menjadi kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan terendah di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan persentase kemiskinan 0.39% menjadi 3.62%. Kondisi tersebut menarik peneliti untuk dilakukan penelitian terkait dengan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan pemaparan Wakil Bupati Deli Serdang yang juga merupakan Ketua TKPK Kabupaten Deli Serdang menyatakan bahwa TKPK mempunyai tujuan untuk memudahkan dalam penanganan kemiskinan yang bersifat lintas pemangku kepentingan dan lintas sektoral yang mana bukan hanya pemerintah yang dilibatkan tetapi non-pemerintah juga dilibatkan seperti dunia usaha dan masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam perencanaan ataupun pelaksanaan kebijakan program pengentasan kemiskinan (Serdang, 2022).

Kondisi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang dengan adanya TKPK dan menjadi Kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah se-Provinsi Sumatera Utara membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi non-pemerintah sehingga terjadi kolaborasi pemerintah. Penelitian yang akan dilakukan berkonsentrasi kepada pelaksanaan tata kelola adaptif dalam implementasi strategi kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian tersebut menggunakan teori Adaptive Governance (Sharma et al., 2018) dengan tujuh indikator dimana nilai-nilai indikator tersebut saling berhubungan dengan kondisi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang terutamanya dengan adanya TKPK.

Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan waktu sehingga peneliti mengambil data di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai keterbaruan dengan menggunakan teori baru Adaptive Governance (Sharma et al., 2018) pada tahun 2018 yang telah teruji dengan telah digunakan puluhan sitasi internasional. Penelitian yang dilakukan berjudul "Pelaksanaan Tata Kelola Adaptif Implementasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang".

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan atau referensi dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian pertama yaitu yang dilakukan oleh Laga Priseptian dan Wiwin Priana Primandhana pada tahun 2022 yang berjudul analisis faktor-faktor yang

mempengaruhi kemiskinan. Penelitian yang dipublikasikan dalam Forum Ekonomi volume 24 Nomor 1 tahun 2022. Penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda model *ordinary least square* atau OLS. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa upah minimum provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Priseptian & Primandhana, 2022). Penelitian kedua yang dilakukan oleh Didin Muhafidin dengan judul konsep pemerintahan yang adaptif dan implikasi terhadap kebijakan publik. Penelitian tersebut dipublikasikan dalam *opening journal system* volume 12 nomor 7 Februari 2018. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa tata kelola pemerintah adaptif dimasa depan mempunyai nilai ekonomi dikarenakan dapat membantu memahami berbagai macam faktor secara bersama-sama untuk menghasilkan potensial kebijakan publik untuk masa depan (Muhafidin, 2018). Penelitian ketiga dilakukan oleh Shafa Faradila dan Niniek Imaningsih berjudul faktor-faktor kemiskinan di Kabupaten Sampang. Penelitian tersebut dipublikasikan dalam jurnal *Dinamika Ekonomi Pembangunan* volume 5 nomor 1 tahun 2022. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis linier berganda dengan data sekunder. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Kemiskinan disebabkan rendahnya nilai pertumbuhan ekonomi. Indeks pembangunan manusia atau IPM berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Faradila & Imaningsih, 2022).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rah Adi Fahmi Ginanjar, Sugeng Setyadi dan Umayatu Suiroh dengan judul analisis strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten. Penelitian tersebut dipublikasikan dalam *JEQu* volume 8 nomor 2 Oktober 2018. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder dan primer melalui analisis SWOT. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa kebijakan ataupun program dalam rencana pembangunan Provinsi Banten dalam penanggulangan kemiskinan sudah cukup komprehensif (Rah Adi Fahmi et al., 2018). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Choiri Amelia, Syamsul Alam Paturusi dan I Nyoman Merit. Penelitian dengan judul sistem tata kelola adaptif melalui kemitraan multipihak dalam konservasi sumber daya alam di Pulau Serang, Kota Denpasar. Penelitian tersebut di publikasikan melalui *Ecotrophic* Volume 13 Nomor 1 tahun 2019. Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan bahwa wujud kemitraan meliputi kemitraan antar institusi pemerintahan dalam pengelolaan biota laut, sistem tata kelola berupa kemitraan pemerintah dan swasta dan tingkat adaptasi masyarakat terhadap berbagai perubahan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang cukup tinggi (Amelia et al., 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan terkait dengan kemiskinan mempunyai suatu hal yang baru yaitu meneliti terkait dengan prestasi yang ada berupa kemiskinan terendah. Penelitian tersebut juga menggunakan konsep *adaptive governance* Sharma (2018) yang masih jarang digunakan oleh peneliti khususnya di Indonesia.

1.5. Tujuan.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tata kelola adaptif dalam implementasi strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang.

II. METODE

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif (Nurdin & Hartati, 2019). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui secara mendalam terkait dengan suatu penelitian untuk mendapatkan arti atau makna secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui

observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian menggunakan teori *Adaptive Governance* Sharma (2018) (Sharma et al., 2018). Penelitian mempunyai lokus di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Wasistiono & Simangunsong, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian terkait dengan pelaksanaan tata kelola adaptif dalam implementasi strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan teori *adaptive governance* Sharma (2018). Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tata kelola adaptif dalam implementasi strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Deli Sedang.

3.1. Pelaksanaan Tata Kelola Adaptif Dalam Implementasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang.

3.1.1. *Collaboaration*

Tindakan bekerja sama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama atau menghasilkan hasil yang sama. Dalam konteks kerja sama ini, orang-orang atau kelompok-kelompok berkontribusi dengan menggabungkan upaya, keterampilan, dan sumber daya mereka untuk mencapai suatu proyek, tugas, atau tujuan tertentu. Pihak yang berkolaborasi adalah individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat dalam tindakan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau menghasilkan hasil yang sama. Dalam konteks kolaborasi, pihak-pihak ini berkontribusi dengan cara menggabungkan upaya, keterampilan, dan sumber daya mereka. Mereka bekerja bersama untuk mencapai suatu proyek, tugas, atau tujuan tertentu. Kolaborasi sebagai bentuk upaya dalam mencapai suatu tujuan bersama dengan saling bekerjasama sehingga dapat memudahkan mencapai tujuan (Hidayatullah & Ali, 2023). Kolaborasi dilakukan dengan bekerjasama dengan menggabungkan sumber daya, keterampilan dan upaya dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial sebagai leading sector penanggulangan kemiskinan yang berkolaborasi dengan Pemerintah Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Dinas serta Badan yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

Peran masyarakat lokal mengacu pada kontribusi, tanggung jawab, dan partisipasi masyarakat yang tinggal di suatu daerah atau wilayah tertentu. Masyarakat lokal adalah kelompok individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan lingkungan tempat mereka tinggal, dan peran mereka dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya di mana mereka berada. Peran masyarakat lokal sebagai bentuk partisipasi, tanggung jawab dan kontribusi masyarakat yang berkaitan langsung dengan lingkungan dan berperan sesuai dengan kondisi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa masyarakat berperan langsung dalam membantu pendataan dan pengawasan kondisi yang berada dalam kategori miskin. Masyarakat membantu memberikan informasi terkait dengan data kemiskinan yang ada serta mudah untuk diajak kerjasama. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat lokal berperan dalam pendataan dan pengawasan kondisi yang berada dalam kategori miskin. Masyarakat tersebut menyatakan bahwa aktif memberikan informasi kepada petugas mengenai warga yang membutuhkan bantuan pendanaan dari pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, warga tersebut juga memberikan saran kepada para penerima bantuan agar mereka berupaya mencari pekerjaan. Ia mengusulkan agar bantuan dari pemerintah digunakan untuk mengelola usaha kecil-kecilan, sehingga dapat membantu mereka menjadi lebih mandiri secara finansial.

3.1.2. *Coordination*

Koordinasi adalah tindakan atau proses mengatur, menggabungkan, atau menyelaraskan kegiatan atau elemen-elemen yang berbeda agar dapat bekerja bersama secara efisien dan efektif. Dalam konteks yang lebih umum, koordinasi melibatkan upaya untuk mengarahkan atau menyatukan berbagai unsur, sumber daya, atau orang agar tujuan bersama dapat dicapai. Koordinasi dalam upaya menyelesaikan masalah sebagai upaya menyelesaikan masalah, koordinasi merujuk pada usaha untuk mengarahkan, menyatukan, dan menyelaraskan berbagai elemen, sumber daya, atau individu agar dapat bekerja bersama secara efisien dan efektif dalam mencapai solusi atau penyelesaian masalah. Koordinasi dalam konteks penyelesaian masalah melibatkan serangkaian langkah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menghindari tumpang tindih, dan memastikan bahwa setiap elemen yang terlibat berkontribusi secara maksimal terhadap mencapai solusi yang berhasil.

Upaya menyelesaikan masalah sebagai bentuk upaya menyelesaikan masalah yang merujuk pada usaha menyatukan, mengarahkan dan menyelaraskan agar dapat bekerjasama secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa koordinasi dilakukan secara berjenjang bertingkat dalam pendataan dan pemantauan kondisi terkategori miskin dari tingkat pemerintah desa dan kelurahan lalu ke tingkat pemerintah kecamatan sedangkan koordinasi pelaksanaan dari Dinas Sosial lalu ke kecamatan dan terakhir ke desa/kelurahan. Koordinasi kegiatan yang dilakukan ketika melakukan pengumpulan data dan monitoring melalui down to top atau dari tingkat pemerintahan paling bawah ke pemerintahan paling atas sedangkan dalam pelaksanaan dari top to down atau tingkat pemerintah paling tinggi ke pemerintah paling rendah. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam upaya menyelesaikan masalah perlu dilakukan koordinasi berjenjang dan bertingkat.

Koordinasi dalam upaya merumuskan tujuan merupakan koordinasi yang melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang seragam mengenai arah yang ingin dicapai dan memberikan kontribusi mereka secara terkoordinasi. Merumuskan tujuan sebagai bentuk koordinasi untuk memastikan kesepakatan semua pihak terkait dengan arah yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa perumusan tujuan sebagai salah satu program prioritas Bupati dan prosesnya ketika ada suatu keputusan baru dapat dilaksanakan atau di kerjakan. Koordinasi dilakukan secara internal serta eksternal dengan berupa rapat koordinasi lintas sektoral serta dalam proses merumuskan tujuan penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam forum perangkat daerah untuk penyusunan tujuan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya merumuskan tujuan dilakukan secara bersama-sama setelah adanya keputusan dari kepala daerah atau Bupati.

3.1.3. *Building Social Capital*

Membangun modal sosial merujuk pada proses atau upaya untuk meningkatkan jaringan sosial, hubungan antarindividu, dan saling ketergantungan positif dalam suatu komunitas atau kelompok. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial dan ekonomi untuk menggambarkan nilai dan manfaat dari hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial merupakan kekuatan yang dapat membantu dalam mencapai tujuan bersama, meningkatkan kepercayaan, dan mendukung kerjasama di antara anggota suatu kelompok atau komunitas.

Pembangunan jaringan komunitas sosial merujuk pada serangkaian kegiatan dan upaya yang bertujuan untuk memperkuat, memperluas, dan memelihara hubungan serta koneksi antar individu, kelompok, atau organisasi di dalam suatu komunitas. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kerja sama, dan saling dukung di antara anggota komunitas dengan cara yang positif dan berkelanjutan. Ini melibatkan pembangunan interaksi sosial yang lebih kuat dan saling ketergantungan

positif antar anggota komunitas. Pembangunan jaringan komunitas sosial yang merujuk kepada suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan memelihara, memperluas dan memperkuat hubungan serta koneksi antar individu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa upaya Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang melakukan dengan menjalin tali silaturahmi dan bekerja secara baik dan ikhlas tanpa adanya mencari keuntungan pribadi atau kelompok serta tolong menolong dan bekerjasama mencapai tujuan dan tugas pemerintah.

Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang tidak hanya menjalin mitra kerjasama dengan pemerintah tetapi dengan non pemerintah dan melakukan kegiatan bersama dimulai dari rapat koordinasi persiapan hingga rapat evaluasi kegiatan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang memperhatikan pembangunan jaringan komunitas sosial dengan pemerintah ataupun non-pemerintah dan melakukan bersama-sama dimulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan.

Ikatan dengan masyarakat merujuk pada hubungan atau keterhubungan antara individu, kelompok, organisasi, atau entitas lain dengan masyarakat di sekitarnya. Ini mencakup interaksi, ketergantungan, dan dampak yang terjadi ketika suatu entitas terlibat dalam kegiatan atau memiliki keterlibatan dengan masyarakat tempat mereka berada. Ikatan dengan masyarakat dapat terjadi di berbagai tingkatan, termasuk tingkat individu, keluarga, organisasi, atau bahkan tingkat kota atau wilayah. Ikatan dengan masyarakat sebagai bentuk keterikatan hubungan antara Dinas Sosial dengan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa hubungan Dinas Sosial dengan masyarakat terjalin secara profesional dengan memegang teguh pengabdian masyarakat dengan kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat. Hubungan Dinas Sosial dengan Masyarakat tidak hanya berada pada kondisi dilapangan tetapi juga Dinas Sosial membuka program konsultasi sosial dan pintu untuk masyarakat di kantor. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang tetap menjaga hubungan dengan masyarakat dan memperhatikan pengabdian untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

3.1.4. *Community Empowerment and Engagement*

Pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat adalah konsep-konsep yang terkait erat dengan memberikan kekuatan, tanggung jawab, dan peran aktif kepada individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Kedua konsep ini mendukung ide bahwa masyarakat yang aktif, terlibat, dan diberdayakan cenderung menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merujuk pada proses memberikan kekuatan atau memberdayakan individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk proses memberdayakan dan memberikan kekuatan ke dalam suatu masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dalam pemberdayaan masyarakat berupaya meningkatkan potensi tenaga kesejahteraan sosial dengan tujuan agar dapat bekerja optimal selain itu melalui pelatihan kerja dari berbagai unsur dengan mengadakan bantuan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Sosial tidak hanya memberikan bantuan tetapi meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM dengan harapan dapat terjadi kesinambungan

Keterlibatan masyarakat mencakup partisipasi aktif individu atau kelompok dalam kegiatan atau keputusan yang mempengaruhi komunitas mereka. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintah sebagai bentuk dari partisipasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan dengan berpartisipasi terhadap kegiatan pelatihan dan memberikan respon sangat baik dalam bekerja sama dengan Dinas Sosial. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengentasan kemiskinan memberikan respon sangat baik dan berperan aktif

3.1.5. Capacity Development

Pengembangan kapasitas merujuk pada serangkaian upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan individu, kelompok, atau organisasi. Tujuannya adalah agar mereka dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan mereka atau berpartisipasi secara lebih aktif dalam pembangunan dan perubahan positif.

Pengembangan kapasitas adalah memberdayakan entitas tersebut agar dapat lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap perubahan atau tuntutan lingkungan di sekitarnya. Ini melibatkan pendekatan berkelanjutan untuk memperkuat kemampuan yang sudah ada atau mengembangkan kemampuan baru. Pengembangan kapasitas sebagai dalam memberdayakan entitas tersebut dengan tujuan agar responsif, efisien dan efektif terhadap perubahan dan tuntutan lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Sosial mengadakan pemberdayaan masyarakat dengan harapan meningkatkan serta mengembangkan kapasitas masyarakat supaya dapat meningkatkan kondisi hidup dengan cara melalui memberikan pelatihan dan beasiswa. Proses pengembangan kapasitas masyarakat memerlukan waktu. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas oleh Dinas Sosial dilakukan dengan peningkatan kompetensi dan kualitas masyarakat itu sendiri meskipun memerlukan waktu.

3.1.6. Knowledge and Decision Making

Hubungan erat antara pengetahuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dengan proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, pengetahuan memberikan landasan atau dasar informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang informasional, rasional, dan efektif. Pengetahuan kolaborasi merujuk pada pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki atau dibagikan bersama oleh individu atau kelompok dalam konteks kerjasama atau kolaborasi. Ini melibatkan berbagi informasi, ide, keterampilan, dan pengalaman di antara para kontributor untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan tugas tertentu.

Pengetahuan kolaborasi sebagai pada pemahaman dan pengetahuan yang dibagikan atau dimiliki oleh kelompok atau individu dalam kolaborasi atau kerjasama. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kolaborasi yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengimplemetnasikan strategi penanggulangan kemiskinan dengan salah satu koordinasi horizontal tingkat dinas dan vertikal pada tingkat kecamatan dan tingkat desa atau kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan. Kolaborasi dalam pelaksanaannya tidak hanya proses perencanaan tetapi terciptanya tujuan. Kolaborasi tidak hanya terbatas pada unsur pemerintah tetapi memberikan kesempatan dan membuka pintukepada non-pemerintahan untuk bergerak tujuan yang sama. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan kolaborasi sebagai proses pemahaman pertukaran pengetahuan dalam mencapai tujuan dari pihak yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan

Pengambilan keputusan adalah proses di mana individu atau kelompok memilih tindakan atau opsi dari beberapa alternatif yang tersedia. Ini melibatkan pertimbangan informasi, nilai-nilai, tujuan, dan preferensi untuk mencapai hasil yang diinginkan atau memecahkan masalah yang dihadapi. Pembuatan keputusan merupakan proses dimana kelompok atau individu memilih tindakan opsi dan beberapa alternatif yang tersedia. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembuatan keputusan utamanya berada di tangan kepala daerah atau Bupati Deli Serdang sedangkan Dinas Sosial hanya sebagai unsur pembantu pelaksana dan penerapan keputusan. Kewenangan penetapan keputusan yang dimiliki Dinas Sosial yaitu dalam keputusan pelaksanaan dengan memperhatikan dan mengutamakan pengabdian pelayanan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembuatan keputusan tetap berada di Kepala Daerah atau

Bupati sedangkan untuk Dinas Sosial mempunyai kewenangan dalam membuat keputusan pelaksanaan.

3.1.7. Leadership Capacity

Kapasitas pemimpin merujuk pada kemampuan, keterampilan, dan sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk memimpin dan mengelola orang atau kelompok dengan efektif. Kapasitas pemimpin menciptakan fondasi yang kuat untuk kepemimpinan yang efektif. Ini melibatkan kombinasi keterampilan interpersonal, kecerdasan emosional, dan keahlian manajemen yang mendukung pencapaian tujuan bersama dan perkembangan tim. Kapasitas pimpinan menciptakan fondasi kuat untuk kepemimpinan yang efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa kapastias pimpinan berbeda-beda satu dengan lainnya tetapi dalam suatu forum sama semua menjadi sama mempunyai tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang harus dicapai. Pimpinan yang ada harus tegas dalam memimpin tidak membeda-bedakan amsing-masing kelompok. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kapasitas pimpinan berbeda-beda kapasitasnya tetapi mempunyai tujuan yang sama.

3.2. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Tata Kelola Adaptif dalam Implementasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang

Faktor pendukung yang terjadi dalam pelaksanaan tata kelola adaptif dalam implementasi strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang. Berbagai faktor pendukung dalam pengurangan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang yaitu dengan adanya arah kebijakan pimpinan Kabupaten Deli Serdang terkait dengan warga sejahtera sebagai bentuk perwujudan visi untuk hal tersebut dilakukan dengan pengurangan kemiskinan. Kondisi tersebut membuat pergerakan pemerintah daerah menjadikan kemiskinan salah satu fokusnya. Program dirancang untuk mewujudkan visi yang ada.

Kegiatan pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan sebagai bentuk pengentasan kemiskinan dengan bekerjasama dengan lembaga pelatihan baik tingkat pemerintah pusat ataupun non pemerintah di Kabupaten Deli Serdang. Selain itu adanya program bantuan langsung dari Pemerintah Pusat menjadi pendukung dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam penanggulangan kemiskinan yang terjadi sebagai berikut :

1. Kebijakan pimpinan terkait dengan penanggulangan kemiskinan;
2. Program kerjasama pelatihan denga lembaga pelatihan milik pemerintah ataupun swasta; dan
3. Program bantuan-bantuan yang ada dari Pemerintah Pusat dalam mengentaskan kemiskinan

3.3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi hambatan Pelaksanaan Tata Kelola Adaptif Dalam Implementasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan tata kelola adaptif dalam implementasi strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Kecamatan, Desa atau Kelurahan dengan mengadakan rapat perencanaan dan evaluasi

2. Melakukan pengecekan oleh Dinas Sosial ataupun tim tingkat kecamatan;
3. Menjalin kolaborasi dengan berbagai unsur untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi;
4. Melakukan pendataan program prioritas dalam memberikan bantuan; dan
5. Membuka rumah konsultasi dan kerjasama dengan berbagai pihak.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Laga Priseptian dan Wiwin Priana Primandhana. Penelitian tersebut membuktikan bahwa upah minimum provinsi memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan berbagai unsur yang mana Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang yang menjadi *leading sector* (Priseptian & Primandhana, 2022). Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Didin Muhafidin diketahui bahwa tata kelola pemerintah adaptif dimasa depan mempunyai nilai ekonomi dikarenakan dapat membantu memahami berbagai macam faktor secara bersama-sama untuk menghasilkan potensial kebijakan publik untuk masa depan sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan perlu dilakukannya pemberdayaan manusia dengan meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM (Muhafidin, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Shafa Faradila dan Niniek Imaningsih didapatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Kemiskinan disebabkan rendahnya nilai pertumbuhan ekonomi. Indeks pembangunan manusia atau IPM berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa penanggulangan kemiskinan perlu didukung oleh kebijakan pimpinan sehingga dapat merumuskan kegiatan atau arah tujuan yang sesuai dengan apa yang diperlukan (Faradila & Imaningsih, 2022). Penelitian Rah Adi Fahmi Ginanjar, Sugeng Setyadi dan Umayatu Suiroh diketahui bahwa kebijakan ataupun program dalam rencana pembangunan Provinsi Banten dalam penanggulangan kemiskinan sudah cukup komprehensif sedangkan berdasarkan penelitian didapatkan bahwa kebijakan pimpinan menjadi salah satu koncu awal dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau perencanaan dalam mencapai target (Rah Adi Fahmi et al., 2018). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Choiri Amelia, Syamsul Alam Paturusi dan I Nyoman Merit didapatkan bahwa wujud kemitraan meliputi kemitraan antar institusi pemerintahan dalam pengelolaan biota laut, sistem tata kelola berupa kemitraan pemerintah dan swasta dan tingkat adaptasi masyarakat terhadap berbagai perubahan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang cukup tinggi sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa dalam proses penanggulangan kemiskinan dilakukan secara berkolaborasi dari berbagai unsur tidak hanya dari pemerintah (Amelia et al., 2019).

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan tata kelola adaptif dalam implementasi strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang terdapat temuan yang menarik bahwa terdapat suatu kerjasama dari unsur non-pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang.

IV. KESIMPULAN

Tata kelola adaptif dalam implementasi strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang yang dimana Dinas Sosial sebagai *leading sector* dalam penanggulangan kemiskinan yang berkolaborasi dengan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, dan Dinas dan Badan dengan

peran masyarakat lokal berperan dalam pendataan dan pengawasan kondisi yang berada dalam kategori miskin; Koordinasi dalam upaya menyelesaikan masalah perlu dilakukan koordinasi berjenjang dan bertingkat dalam upaya merumuskan tujuan dilakukan bersama-sama setelah adanya keputusan kepala daerah atau Bupati; Membangun modal sosial memperhatikan pembangunan jaringan komunitas sosial dengan pemerintah ataupun non-pemerintah dan melakukan bersama-sama dimulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan dengan menjaga hubungan dengan masyarakat memperhatikan pengabdian untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat; Pemberdayaan dan ketertiban masyarakat tidak hanya memberikan bantuan tetapi meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM dengan harapan dapat terjadi kesinambungan dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang memberikan respon sangat baik dan berperan aktif; Pengembangan kapasitas dilakukan dengan peningkatan kompetensi dan kualitas masyarakat itu sendiri meskipun memerlukan waktu; Pembuatan keputusan dan pengetahuan sebagai proses pemahaman pertukaran pengetahuan dalam mencapai tujuan dari pihak berkolaborasi untuk mencapai tujuan dengan keputusan tetap berada di Kepala Daerah; dan Kapasitas pimpinan berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang sama

Keterbatasan Penelitian. Penelitian yang dilakukan masih mempunyai keterbatasan terutama yang dimiliki oleh peneliti yaitu terkait dengan kompetensi peneliti dalam bidang kebijakan serta keterbatasan waktu sehingga belum melakukan observasi secara lebih menyeluruh terutama kepada masyarakat dan unsur non-pemerintah.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian ini masih sebagai sebuah langkah awal yang dapat dikembangkan kemudian hari dengan berbagai fokus dan lokus yang dapat memperkaya pengetahuan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika IPDN dan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang yang telah membantu dari berbagai macam upaya dalam penelitian yang dilakukan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, B., Prabawa, A., & Kencana, H. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.501>
- Amelia, C., Paturusi, S. A., & Merit, I. N. (2019). Sistem Tata Kelola Adaptif melalui. *ECOTROPIC : Jurnal Ilmu Lingkungan (Journal of Environmental Science)*, 13(1), 85. <https://doi.org/10.24843/ejes.2019.v13.i01.p09>
- Arifin, Z. (2021). *Pengertian dan Perkembangan UMKM Di Indonesia* (Z. Arifin (ed.); 1st ed.). STIE Y.A.I.
- Azizah, E. W., Sudarti, S., & Kusuma, H. (2018). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 167–180.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Kemiskinan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023. In *Badan Pusat Statistik Deli Serdang* (Issue 05). <https://deliserdangkab.bps.go.id/pressrelease/2024/03/08/332/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-deli-serdang-tahun-2023.html#:~:text=Perekonomian Kabupaten Deli Serdang berdasarkan,mencapai Rp 79.603%2C68 miliar.>

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. *Badan Pusat Statistik*, 57, 1–8. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- Faradila, S., & Imaningsih, N. (2022). Faktor-Faktor Kemiskinan Di Kabupaten Sampang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 545–552. <https://doi.org/10.33005/jdep.v5i1.313>
- Kausar Akbar Gani. (2022). *Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Barat*. Universitas Teuku Umar.
- Maulana, R., Pitoyo, A. J., & Alfana, M. A. F. (2022). Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Kondisi Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Media Komunikasi Geografi*, 23(1), 12–24. <https://doi.org/10.23887/mkg.v23i1.39301>
- Muhafidin, D. (2018). Konsep Pemerintahan Yang Adaptif Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Publik. *Media Bina Ilmiah*, 12(7), 207–214.
- Nuridin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendikia.
- Parwa, I. G. N. J. L. A., & Yasa, I. G. W. M. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8(5), 945–973.
- Priseptian, L., & Primandhana, W. priana. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Forum Ekonomi*, 4(2), 45–53. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>
- Purwandari, A. W. I. A. S. T. A., & Ayu, P. P. (2021). Peranan E-Commerce di Berbagai Kalangan di Indonesia dalam Berbagai Bidang Perekonomian Akibat dari Dampak Pandemi Covid-19. *Journal of Education and Technology*, 1(1), 1–13.
- Rah Adi Fahmi, G., Setyadi, S., & Suuro, U. (2018). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(2), 227–248. <https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4450>
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2020). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 35–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631>
- Serdang, P. D. (2022). *Persentase Kemiskinan di Deli Serdang Paling Rendah di Sumatera Utara*. Portal.Deliserdangkab.Go.Id. <https://portal.deliserdangkab.go.id/persentase-kemiskinan-di-deli-serdang-paling-rendah-di-sumatera-utara.html>
- Sharma, P. N., Morgeson Iii, F. V, Mithas, S., & Aljazzaf, S. (2018). *An empirical and comparative analysis of E-government performance measurement models: Model selection via explanation, prediction, and parsimony*. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.07.003>
- Solana, A. (2021). Analisis Prioritas Pembangunan Subsektor Pertanian Tanaman Pangan Dalam Kaitannya Dengan Tingkat Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan Di Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Official Statistics, 2021*(1), 130–138. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.790>
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 271. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653>
- Wasistiono, P. S., & Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*.
- Zahrawati, F. (2020). Pembebasan Jerat Feminisasi Kemiskinan. *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v2i1.1327>